

LAMPIRAN

Nomor : 537/PSSK-PAL/99 3 Maret 1999  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : PPN Buku Pelajaran yang ditanggung Pemerintah.

Yth. Direktur Pajak Pertambahan Nilai  
dan Pajak tidak langsung lainnya (PPN dan PTLL)  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 42-43  
Jakarta Selatan

Dalam rangka mendukung program Pengaman Jaring Sosial (JPS), Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah  
Kejuruan Jakarta Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan teralokasi anggaran biaya tambahan (ABT) sebesar  
38.722.810.000,- (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta delapan sepuluh ribu rupiah),-. Dana  
tersebut untuk pengadaan buku Pelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dana tersebut di atas dikontrakan kepada beberapa penerbit (Penerbit dan Judul Buku terlampir). Mengacu pada  
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990, Kepmen Depkeu No. 396/KM K.04/1990 serta pengarahannya Presiden  
Republik Indonesia pada Rakor IKAPI bulan September 1998 yang lalu maka dalam kontrak dimaksud tidak  
termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Mengingat dalam pelaksanaan kontrak khususnya proses penagihan di KPKN Jakarta III masih membutuhkan surat  
dari kantor pajak yang menyatakan bahwa PPN buku pelajaran dimaksud ditanggung pemerintah, maka kegiatan  
pengadaan buku pelajaran SMK tersebut tidak bisa dibayarkan karena pihak penerbit tidak memperhitungkan PPN  
sewaktu mengajukan penawaran.

Mengingat hal tersebut di atas maka program proyek yang berkaitan dengan JPS ini belum dapat dilaksanakan,  
sementara dana ini adalah APBN Murni yang jangka waktunya tinggal beberapa hari lagi, untuk itu kami mohon  
bapak dapat memberikan rekomendasi mengenai masalah tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir daftar penerbit dan buku pelajaran yang dibeli.

Demikianlah atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK,

ttd

DJAI, SE